

TANTANGAN DAN PELUANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSI: STUDI KASUS DI SEKOLAH DASAR NEGERI 016 SUNGAI KUNJANG

Nur Agus Salim¹, Nurdin Arifin², Asih Wulandari³

^{1,2,3}PGSD FKIP Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

¹nuragussalim@uwgm.ac.id, ²arifin.nurdin@uwgm.ac.id, ³wulndr1002@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to identify challenges and analyze opportunities in the implementation of inclusive education at SD Negeri 016 Sungai Kunjang. Using a qualitative approach with a case study design, the research involved 11 informants consisting of the principal, six classroom teachers, two Special Education Teachers (GPK), and two parents of Students with Special Needs (PDBK). Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation, then analyzed using the Miles and Huberman model. The research identified nine main findings: understanding of inclusion is not uniform, curriculum is adjusted but limited, inadequate number of GPK (2 GPK for 54 PDBK), classroom teachers experience dual burdens, minimal facilities and infrastructure, operational funds are unavailable, collaboration is beginning to form but not optimal, teacher training is rarely conducted, and the attitude of regular students is quite positive. This research concludes that inclusive education can be optimized through strengthening support systems, enhancing teacher capacity, providing special budgets, and structured collaboration between schools, parents, and government.

Keywords: *inclusive education, challenges, opportunities, Special Education Teachers, collaboration*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tantangan dan menganalisis peluang dalam implementasi pendidikan inklusi di SD Negeri 016 Sungai Kunjang. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, penelitian melibatkan 11 informan yang terdiri dari kepala sekolah, enam guru kelas, dua Guru Pendamping Khusus (GPK), dan dua orang tua siswa Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian mengidentifikasi sembilan temuan utama: pemahaman inklusi belum merata, kurikulum disesuaikan namun terbatas, jumlah GPK tidak memadai (2 GPK untuk 54 PDBK), guru kelas mengalami beban ganda, sarana prasarana minim, dana operasional belum tersedia, kolaborasi mulai terbentuk namun belum optimal, pelatihan guru jarang dilakukan, dan sikap siswa reguler cukup positif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan inklusi dapat dioptimalkan melalui penguatan sistem pendukung, peningkatan kapasitas guru, penyediaan anggaran khusus, dan kolaborasi terstruktur antara sekolah, orang tua, dan pemerintah.

Kata Kunci: pendidikan inklusi, tantangan, peluang, Guru Pendamping Khusus, kolaborasi.

A. Pendahuluan

Pendidikan inklusi merupakan sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk belajar di sekolah terdekat, di kelas yang sama dengan siswa seusianya. Penyelenggaraan pendidikan inklusi berarti menciptakan lingkungan tertentu sehingga siswa dengan berkebutuhan khusus dapat belajar, bermain, dan berinteraksi dengan semua anak. Setiap siswa berkebutuhan khusus memiliki program pembelajaran yang dipersonalisasi yang memungkinkan mereka mengembangkan semua potensinya sesuai dengan kemampuannya tanpa adanya diskriminasi (Arriani, dkk., 2021). Pendidikan inklusi tidak hanya berperan sebagai sarana pembelajaran akademik, tetapi juga sebagai media pembentukan nilai-nilai sosial yang positif. Dengan melibatkan anak-anak berkebutuhan khusus dalam kelas reguler, siswa diajak untuk memahami bahwa perbedaan bukanlah hambatan, melainkan kekayaan yang perlu diterima dan dihormati (Sembung, dkk., 2023).

Di Indonesia, khususnya di tingkat Sekolah Dasar (SD), sejumlah sekolah menerapkan pendidikan inklusi sebagai wujud komitmen pemerintah dalam membangun generasi penerus bangsa yang menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan. Menurut Tahsinia & Pujiaty (2024), dengan mengimplementasikan pendidikan inklusi, sekolah tidak hanya

mempersiapkan siswa berkebutuhan khusus untuk berpartisipasi dalam masyarakat, tetapi juga mempersiapkan siswa reguler untuk memahami dan menghargai perbedaan di antara mereka. Implementasi pendidikan inklusi sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa terkecuali. Keberhasilan pendidikan inklusi sangat bergantung pada kesiapan sekolah, ketersediaan Guru Pendamping Khusus (GPK), serta dukungan dari orang tua dan masyarakat (Halidjah & Asrori, 2025).

Implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi khusus seperti Guru Pendamping Khusus (GPK) dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Banyak guru mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi dan melakukan asesmen awal terhadap siswa ABK, serta belum mampu merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, serta komunikasi yang belum optimal antara sekolah, pemerintah, dan orang tua turut menjadi faktor penghambat (Wijaya, dkk., 2023). Ketersediaan tenaga pendidik yang dilatih untuk anak berkebutuhan khusus masih sangat terbatas, dan sarana prasarana pendidikan juga perlu dijaga dan dipelihara dengan baik (Arifin, dkk., 2023). Penerapan pendidikan inklusi

di sekolah dasar memerlukan perhatian khusus karena siswa pada generasi ini masih memerlukan bimbingan intensif dari guru, sehingga kehadiran anak berkebutuhan khusus di kelas reguler mungkin menjadi tantangan langsung bagi administrator sekolah dan guru (Anggreani, dkk., 2024).

Pendidikan inklusi di SD Negeri 016 Sungai Kunjang menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan pendidikan yang ramah bagi semua anak, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus. Namun, situasi di sekolah ini menunjukkan adanya hambatan signifikan dalam pelaksanaannya. Dengan jumlah 24 kelas dan hanya tersedia 2 Guru Pendamping Khusus (GPK), tanggung jawab utama untuk mendampingi siswa ABK di kelas lebih banyak dipegang oleh guru kelas. Di setiap kelasnya terdapat ABK, sebanyak 2 ABK bahkan bisa lebih, di mana mereka memerlukan perhatian dan strategi pengajaran khusus. Kondisi ini menimbulkan dua permasalahan utama. Pertama, keterbatasan sumber daya GPK menyebabkan tidak semua siswa ABK mendapatkan pendampingan intensif sesuai kebutuhan, yang dapat mempengaruhi perkembangan akademik dan sosial mereka. Kedua, beban tugas guru kelas yang memiliki tanggung jawab ganda, yaitu mengajar siswa reguler sekaligus memberikan perhatian khusus kepada siswa ABK, dapat mengurangi efektivitas pembelajaran.

Di sisi lain, pendidikan inklusi juga membuka berbagai peluang yang

dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Pendidikan inklusi memiliki peran signifikan dalam membentuk karakter siswa agar lebih toleran, empatik, dan menghormati keberagaman. Menurut Hasugian & Sidabalok (2024), pendidikan inklusi mampu meningkatkan pemahaman siswa tentang keberagaman budaya serta memperkuat sikap empati dan kolaboratif di dalam kelas. Anak-anak yang mendapatkan pendidikan inklusi memiliki peluang lebih besar untuk mencapai kesuksesan di masa dewasa, dengan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan sosial, kemandirian, dan keterampilan memecahkan masalah yang diperlukan untuk beradaptasi dan berkontribusi dalam masyarakat. Melalui pendidikan inklusi, anak-anak dengan kebutuhan khusus dapat mencapai prestasi akademik yang tinggi dan memiliki kesempatan yang setara untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan hidup mereka (Mustika, dkk., 2023).

Untuk mewujudkan keberhasilan pendidikan inklusi, kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan sangatlah penting. Pemerintah, institusi pendidikan, pendidik, orang tua, dan masyarakat harus bersinergi dalam menciptakan lingkungan inklusif yang mendukung kebutuhan setiap anak. Program pelatihan dan pengembangan profesional bagi para guru perlu diselenggarakan secara rutin, agar mereka dapat menguasai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menerapkan praktik pendidikan inklusi (Mustika, dkk.,

2023). Keberhasilan pengelolaan pendidikan inklusi di sekolah dasar sangat dipengaruhi oleh peningkatan kompetensi guru dalam menangani siswa berkebutuhan khusus, yang dapat dicapai melalui pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan (Tahsinia & Pujiaty, 2024). Peran guru dalam menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi faktor penting dalam keberhasilan sistem inklusi, sementara dukungan dari orang tua dan masyarakat dapat meningkatkan prestasi akademik maupun keterampilan sosial anak berkebutuhan khusus.

Dengan demikian, pendidikan inklusi bukan hanya tentang memberikan akses yang sama bagi semua siswa, tetapi juga tentang membangun karakter yang kuat dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Ketika diterapkan dengan baik, pendekatan ini dapat menjadi alat yang efektif dalam menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan penuh penghargaan terhadap keberagaman. Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji problematika pendidikan inklusi secara umum, masih terbatas kajian yang secara komprehensif menganalisis tantangan dan peluang implementasi pendidikan inklusi dalam konteks spesifik sekolah dengan jumlah peserta didik berkebutuhan khusus yang signifikan. Kondisi di SD Negeri 016 Sungai Kunjang yang memiliki 54 Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) dengan berbagai kategori kebutuhan

khusus, yaitu ADHD, autisme, tunagrahita, low vision, slow learner, tunarungu, dan tunadaksa, menunjukkan kompleksitas yang memerlukan kajian mendalam.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan menganalisis secara mendalam peluang dalam pendidikan inklusi di SD Negeri 016 Sungai Kunjang. Penekanan utamanya adalah menggali sejauh mana pemahaman para guru, kepala sekolah, dan orang tua tentang inklusi, serta bagaimana mereka merespons dinamika yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung, khususnya bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan inklusi dan memberikan manfaat maksimal bagi semua siswa, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi kebijakan pengembangan dan praktik pendidikan inklusi di Indonesia, khususnya dalam mengoptimalkan kolaborasi antarpihak untuk mengatasi tantangan yang ada.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang didasarkan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti fenomena dalam kondisi alami dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama (Sugiyono, 2020). Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 016 Sungai

Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur pada bulan Februari sampai Maret 2025. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling dan diperkuat dengan teknik snowball sampling, terdiri dari sebelas orang, yaitu satu kepala sekolah, enam guru kelas (kelas I hingga VI), dua Guru Pendamping Khusus (GPK), dan dua orang tua dari siswa Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK). Pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan langsung mereka dalam pelaksanaan pendidikan inklusi, sehingga mampu memberikan informasi yang mendalam dan kontekstual mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi. Penelitian ini bersifat eksploratif dengan fokus pada pengumpulan data yang kaya akan makna untuk menemukan pola, tema, dan hubungan yang relevan dengan fenomena pendidikan inklusi.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pendekatan semi-terstruktur untuk menggali perspektif, pengalaman, dan pandangan informan terkait implementasi pendidikan inklusi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung interaksi antara guru, siswa ABK, dan siswa reguler di kelas untuk menangkap data yang mungkin tidak diungkapkan dalam wawancara (Sugiyono, 2020). Dokumentasi meliputi arsip sekolah, data peserta didik berkebutuhan khusus, dan kebijakan sekolah terkait pendidikan inklusi. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi

sumber, yaitu memverifikasi data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber untuk melihat kesesuaian dan konsistensi informasi (Sugiyono, 2020). Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data (penyederhanaan dan pemfokusan data), penyajian data (penyusunan informasi secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif), dan penarikan kesimpulan (penggabungan informasi dari berbagai sumber untuk memberikan pemahaman menyeluruh). Proses analisis dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan hingga data jenuh, sehingga menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian

SD Negeri 016 Sungai Kunjang merupakan salah satu sekolah inklusi di Kota Samarinda yang memiliki 24 kelas dengan jumlah Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) yang signifikan. Berdasarkan data rekapitulasi selama tiga tahun terakhir, pada tahun ajaran 2024/2025 terdapat 54 PDBK yang tersebar di berbagai jenjang kelas dengan kebutuhan khusus yang beragam. Jenis PDBK yang ditangani meliputi autisme (17 anak), ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder (13 anak), slow learner (13 anak), tunagrahita (5 anak), tunadaksa (2 anak), low vision (2 anak), dan tunarungu (1 anak).

Keberagaman jenis kebutuhan khusus ini menunjukkan kompleksitas tantangan yang dihadapi sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi. Sekolah ini memiliki ruang sumber dan dua Guru Pendamping Khusus (GPK) untuk mendukung pelaksanaan pendidikan inklusi, meskipun jumlah tersebut masih belum sebanding dengan jumlah PDBK yang ada.

Pemahaman tentang pendidikan inklusi di kalangan pemangku kepentingan menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Kepala sekolah dan GPK memiliki pemahaman yang komprehensif tentang pendidikan inklusi, tidak hanya melihatnya sebagai integrasi fisik siswa berkebutuhan khusus ke dalam kelas reguler, tetapi juga menekankan pentingnya asesmen awal, kemampuan bersosialisasi, dan kemandirian anak. Kepala sekolah menyatakan bahwa tujuan utama pendidikan inklusi adalah membentuk kemampuan bersosialisasi dan kemandirian anak, bukan semata pada aspek akademik. Guru kelas memahami konsep inklusi secara lebih praktis melalui pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang memiliki keterbatasan. Sementara itu, pemahaman orang tua PDBK masih terbatas dan cenderung sederhana, di mana mereka hanya memahami bahwa anak mereka diperbolehkan sekolah di sekolah reguler meskipun memiliki kebutuhan khusus. Kesenjangan pemahaman ini menandakan perlunya sosialisasi yang lebih intensif terkait esensi dan

manfaat pendidikan inklusi, terutama kepada orang tua dan masyarakat.

Implementasi kurikulum dalam konteks inklusi di SD Negeri 016 Sungai Kunjang masih bersifat umum dan belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan individual PDBK. Kurikulum yang digunakan tetap merujuk pada kurikulum nasional, namun ada penyesuaian tertentu yang dilakukan oleh guru kelas dan GPK meskipun belum sistematis. Penyesuaian dilakukan dengan cara memodifikasi materi pembelajaran, di mana ketika siswa reguler sudah belajar materi yang lebih kompleks, siswa PDBK diberikan materi yang lebih sederhana sesuai kemampuan mereka. Evaluasi pembelajaran juga disesuaikan dengan memberikan soal yang lebih sederhana atau memberikan bantuan dalam membacakan soal kepada PDBK. Namun, penyesuaian ini dilakukan berdasarkan inisiatif pribadi guru tanpa pedoman yang baku dan tanpa adanya dokumen rencana pembelajaran individual (RPI) atau asesmen yang terstruktur. Hal ini berdampak pada pemenuhan hak belajar PDBK yang idealnya disesuaikan dengan kemampuan dan hambatan masing-masing secara lebih sistematis dan terencana.

Keterbatasan jumlah Guru Pendamping Khusus (GPK) merupakan tantangan utama dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah ini. Dengan hanya tersedia dua orang GPK untuk menangani 54 PDBK yang tersebar di 24 kelas, rasio pendampingan menjadi sangat tidak ideal. Kepala sekolah mengakui

bahwa jumlah GPK masih sangat terbatas, di mana idealnya satu GPK mendampingi dua atau tiga siswa, namun kenyataannya satu GPK harus menangani lebih dari jumlah tersebut. Salah satu GPK menyampaikan bahwa dirinya menangani tujuh anak dengan kebutuhan yang berbeda-beda sehingga tidak dapat memberikan pendampingan secara maksimal. Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa GPK tidak selalu tersedia di dalam kelas, karena mereka lebih sering fokus di ruang sumber, sehingga guru kelas harus menangani PDBK sendiri di dalam kelas. Keterbatasan sumber daya GPK ini berdampak langsung terhadap efektivitas pembelajaran dan perhatian khusus yang seharusnya diterima oleh PDBK untuk mengoptimalkan perkembangan akademik dan sosial mereka.

Guru kelas menghadapi beban kerja yang meningkat akibat harus mengelola kelas reguler sekaligus menangani PDBK tanpa dukungan yang memadai. Beberapa guru menyampaikan bahwa mengajar anak reguler saja sudah cukup berat, dan ketika ada anak PDBK yang membutuhkan perhatian khusus, mereka menjadi kewalahan karena tidak dapat membagi waktu secara efektif. Guru harus menjelaskan materi pembelajaran dua kali dengan pendekatan yang berbeda, satu untuk anak reguler dan satu lagi untuk PDBK dengan bahasa yang lebih sederhana, yang tentunya membutuhkan waktu dan tenaga ekstra. GPK mengonfirmasi bahwa guru kelas sangat terbebani karena

belum ada sistem pendampingan yang memadai, sehingga pembelajaran untuk PDBK kadang tidak maksimal. Kepala sekolah menyadari beban guru kelas yang sangat berat dalam mengajar 30-an anak dengan latar belakang yang berbeda termasuk beberapa anak PDBK, namun saat ini belum ada kebijakan khusus yang dapat meringankan beban tersebut. Beban ganda ini menunjukkan perlunya dukungan sistemik dan pembagian tugas yang jelas antara guru kelas dan GPK agar guru kelas dapat menjalankan peran inklusif secara optimal.

Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pendidikan inklusi di SD Negeri 016 Sungai Kunjang masih tergolong minim dan belum memadai. Kepala sekolah menyampaikan bahwa masih banyak fasilitas yang belum tersedia, seperti toilet khusus untuk siswa berkebutuhan khusus atau jalur akses kursi roda bagi siswa tunadaksa. Guru-guru melaporkan bahwa sekolah belum memiliki fasilitas khusus untuk siswa PDBK, sehingga semua kegiatan pembelajaran masih menyatu di ruang kelas reguler tanpa adanya adaptasi fisik yang memadai. Alat bantu pembelajaran seperti headphone untuk siswa dengan gangguan pendengaran, media visual khusus, kartu bergambar, atau alat tulis modifikasi juga belum tersedia di sekolah. GPK mengungkapkan kekhawatiran bahwa fasilitas yang belum menunjang sangat mempengaruhi efektivitas pembelajaran, misalnya anak

tunarungu sangat membutuhkan media visual atau alat bantu dengar namun belum tersedia. Orang tua PDBK juga mengonfirmasi bahwa fasilitas di sekolah belum memadai, meskipun anak mereka tetap dapat mengakses fasilitas dasar seperti toilet atau ruang kelas. Keterbatasan infrastruktur ini menjadi salah satu hambatan utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang benar-benar inklusif dan ramah bagi semua jenis kebutuhan khusus.

Aspek pembiayaan menjadi tantangan signifikan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah ini. Kepala sekolah menyebutkan bahwa belum ada anggaran khusus dari Dinas Pendidikan untuk pendidikan inklusi, dan dana BOS yang ada juga belum mengatur secara spesifik keperluan PDBK, sehingga sekolah harus kreatif dalam mengalokasikan dana yang terbatas. Pengadaan alat bantu belajar atau penyelenggaraan pelatihan untuk guru belum mendapat alokasi dana khusus, sehingga sekolah hanya dapat menyediakan bahan ajar seadanya. GPK menyampaikan harapannya agar ada bantuan biaya khusus dari Dinas Pendidikan untuk pembelajaran PDBK, karena selama ini belum ada dukungan finansial yang memadai. Bahkan ketika ingin mengikuti pelatihan atau membeli alat bantu pembelajaran, GPK sering kali harus menggunakan biaya pribadi. Keterbatasan dana ini juga berdampak pada orang tua PDBK yang harus mengeluarkan biaya lebih tinggi dibandingkan dengan orang tua

siswa reguler, karena mereka harus membayar pendamping, guru privat, dan alat bantu belajar tambahan. Orang tua juga menyatakan bahwa tidak ada bantuan terapi dari sekolah, hanya bantuan dalam bentuk bimbingan belajar. Minimnya dukungan dana ini menjadi penghambat serius dalam pengembangan layanan inklusi secara maksimal dan berkelanjutan.

Kolaborasi antara guru kelas dan GPK di SD Negeri 016 Sungai Kunjang sudah mulai terjalin, meskipun masih terbatas dalam intensitas dan sistematisasinya. Beberapa guru kelas menyampaikan bahwa mereka kadang berdiskusi dengan GPK tentang metode atau pendekatan yang dapat digunakan untuk anak berkebutuhan khusus, namun waktu untuk diskusi tersebut sering kali tidak mencukupi. Belum ada jadwal khusus untuk evaluasi bersama antara guru kelas dan GPK, sehingga pertukaran informasi sering hanya terjadi secara spontan tanpa perencanaan yang matang. GPK menyatakan bahwa mereka harus bekerja sama dengan guru kelas karena guru kelas yang paling sering berinteraksi dengan siswa, namun kendala utamanya adalah belum ada waktu khusus yang dialokasikan untuk perencanaan bersama. Sementara itu, hubungan antara sekolah dan orang tua siswa PDBK juga belum berjalan secara optimal. Orang tua menyampaikan bahwa komunikasi dengan sekolah masih jarang terjadi, meskipun mereka merasa sekolah cukup mendukung peran orang tua. Kondisi ini menunjukkan pentingnya

membangun sistem komunikasi yang lebih terstruktur dan menyediakan waktu khusus untuk koordinasi antara semua pihak yang terlibat dalam pendidikan inklusi, termasuk memberikan pelatihan kepada orang tua untuk menunjang keberhasilan pembelajaran anak di rumah.

Kualitas pendidikan inklusi sangat bergantung pada kompetensi guru, namun sebagian besar guru di sekolah ini belum mendapatkan pelatihan khusus terkait penanganan PDBK. Kepala sekolah mengakui keterbatasan dalam menyediakan pelatihan dan menyatakan harapannya agar guru dapat mengikuti pelatihan, namun terkendala oleh keterbatasan dana dan minimnya undangan pelatihan dari pihak eksternal. Beberapa guru kelas menyampaikan bahwa pelatihan sangat penting untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menangani PDBK, namun selama ini belum pernah difasilitasi oleh sekolah atau pemerintah daerah. GPK menambahkan bahwa tidak semua GPK memiliki latar belakang pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa, sehingga pelatihan menjadi sangat penting agar penanganan PDBK dapat dilakukan dengan lebih tepat dan profesional. Orang tua PDBK juga menyampaikan harapannya bahwa jika guru-guru mendapat pelatihan yang memadai, mereka akan lebih siap dan mampu membantu anak-anak mereka dalam proses belajar. Temuan ini memperkuat kebutuhan akan program pelatihan profesional yang berkelanjutan dan terstruktur sebagai

investasi penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan inklusi, baik untuk guru kelas maupun GPK.

Siswa reguler di SD Negeri 016 Sungai Kunjang umumnya menunjukkan sikap yang positif terhadap teman PDBK mereka, meskipun masih ditemukan beberapa hambatan dalam interaksi sosial. Beberapa guru melaporkan bahwa anak-anak sudah mulai menerima kehadiran teman PDBK di kelas mereka, namun masih ada beberapa siswa yang mengejek atau menjauhi teman mereka yang berperilaku berbeda karena belum memahami kondisi teman mereka. Guru-guru berperan penting dalam menumbuhkan empati dan pemahaman siswa reguler dengan memberikan penjelasan agar mereka tidak menjauhi teman yang berbeda dan memahami bahwa setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Banyak siswa reguler yang bersedia membantu teman PDBK mereka dalam kegiatan pembelajaran, seperti membacakan soal, membawakan buku, atau membantu ketika teman mereka mengalami kesulitan. GPK mengapresiasi sikap positif ini namun menekankan bahwa masih perlu adanya pembiasaan dan pembelajaran sosial yang berkelanjutan karena tidak semua siswa tahu bagaimana harus bersikap kepada teman yang berbeda. Orang tua PDBK menyampaikan pengalaman bahwa anak mereka awalnya pernah mengalami penolakan dari teman-teman, namun seiring waktu sudah mulai memiliki

teman dekat dan dapat berinteraksi dengan baik. Ketika terjadi konflik atau diskriminasi, sekolah menyelesaikannya secara kekeluargaan dengan memanggil orang tua siswa yang terlibat untuk menyelesaikan masalah secara damai.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, pendidikan inklusi di SD Negeri 016 Sungai Kunjang juga menunjukkan sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan. Kolaborasi antara guru kelas dan GPK yang sudah mulai terjalin dapat diperkuat melalui penjadwalan pertemuan rutin dan sistem evaluasi bersama yang terstruktur. Sikap positif dan empati yang mulai tumbuh di kalangan siswa reguler menunjukkan bahwa pendidikan inklusi dapat menjadi media efektif untuk membentuk karakter toleran dan menghargai keberagaman sejak dini. Kesadaran kepala sekolah dan guru tentang pentingnya pendidikan inklusi menjadi modal dasar yang kuat untuk pengembangan program yang lebih baik. Ketersediaan ruang sumber di sekolah, meskipun masih perlu peningkatan fasilitas, dapat dioptimalkan sebagai pusat pembelajaran dan terapi bagi PDBK. Dukungan orang tua yang mulai terbentuk, meskipun masih perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan pelatihan, menunjukkan potensi untuk membangun kemitraan yang lebih kuat antara sekolah dan keluarga. Dengan adanya komitmen dari berbagai pihak dan kesediaan untuk terus belajar dan beradaptasi, sekolah

memiliki peluang besar untuk mengembangkan model pendidikan inklusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengidentifikasi sembilan temuan penting dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di SD Negeri 016 Sungai Kunjang. Pertama, pemahaman tentang pendidikan inklusi belum merata di antara pemangku kepentingan, dengan kepala sekolah dan GPK memiliki pemahaman yang lebih mendalam dibandingkan guru kelas dan orang tua. Kedua, kurikulum sudah mulai disesuaikan namun masih terbatas dan belum sistematis. Ketiga, jumlah GPK yang tersedia belum memadai dengan rasio 2 GPK untuk 54 PDBK. Keempat, guru kelas mengalami beban ganda dalam mengelola pembelajaran diferensiasi. Kelima, sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan inklusi masih sangat minim. Keenam, dana operasional khusus untuk pendidikan inklusi belum tersedia. Ketujuh, kerja sama antara guru kelas, GPK, dan orang tua sudah mulai terbentuk namun belum optimal. Kedelapan, pelatihan khusus untuk guru masih sangat jarang dilakukan. Kesembilan, sikap siswa reguler terhadap PDBK cukup positif meskipun masih memerlukan pembinaan berkelanjutan. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusi sangat mungkin dijalankan lebih optimal jika tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi secara kolaboratif melalui dukungan kebijakan, peningkatan sumber daya,

dan penguatan kapasitas semua pihak yang terlibat.

Pembahasan

Implementasi pendidikan inklusi di SD Negeri 016 Sungai Kunjang menunjukkan keberagaman pemahaman di kalangan para pemangku kepentingan. Kepala sekolah dan GPK cenderung memahami konsep pendidikan inklusi secara menyeluruh sebagai bentuk layanan pendidikan yang mengakomodasi seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dalam satu sistem yang setara. Sementara itu, guru kelas memahami inklusi secara lebih praktis melalui pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi siswa di kelas. Di sisi lain, orang tua PDBK masih memiliki pemahaman yang terbatas, bahkan cenderung sederhana, yang menandakan perlunya sosialisasi yang lebih intensif terkait esensi dan manfaat pendidikan inklusi. Kesenjangan pemahaman ini berimplikasi langsung terhadap kualitas kolaborasi dan dukungan yang diberikan kepada PDBK di lingkungan sekolah. Tanpa pemahaman yang merata, upaya menciptakan lingkungan inklusif yang efektif akan menghadapi hambatan, karena setiap pihak memiliki ekspektasi dan cara kerja yang berbeda dalam mendukung pembelajaran PDBK.

Dalam penerapan kurikulum dan pembelajaran, guru dan GPK melakukan penyesuaian materi dan evaluasi meskipun belum secara

sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa adaptasi masih dilakukan berdasarkan inisiatif pribadi tanpa pedoman yang baku. Penyesuaian dilakukan dengan memodifikasi soal atau memberikan pendampingan, namun tanpa adanya dokumen rencana pembelajaran individual (RPI) atau asesmen yang terstruktur. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ni'mah, dkk. (2022) yang menemukan bahwa tantangan utama dalam implementasi pendidikan inklusi mencakup aspek kurikulum yang sering kali belum sesuai dengan kebutuhan individual ABK, sehingga menyebabkan kesulitan dalam implementasi di sekolah inklusi. Keseluruhan problematika ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan inklusi tidak hanya bergantung pada metode pembelajaran, tetapi juga pada sistem pendukung yang lebih luas. Ketiadaan pedoman dan instrumen penyesuaian kurikulum yang terstandar menyebabkan inkonsistensi dalam pelayanan terhadap PDBK, di mana kualitas pembelajaran sangat bergantung pada inisiatif dan kemampuan individual guru.

Keterbatasan jumlah GPK menjadi tantangan krusial yang berdampak langsung terhadap efektivitas pendidikan inklusi. Dengan rasio 2 GPK untuk 54 PDBK yang tersebar di 24 kelas, pendampingan yang diberikan menjadi tidak optimal dan tidak merata. Hasil penelitian Hanaa & Mia Evani (2022) menunjukkan bahwa ketiadaan GPK berdampak negatif pada pembelajaran anak berkebutuhan

khusus, karena guru kelas yang menangani mereka tidak memiliki kompetensi khusus untuk memberikan layanan pendidikan yang optimal. Dalam konteks SD Negeri 016 Sungai Kunjang, keterbatasan jumlah GPK serta minimnya kompetensi guru dalam pendidikan luar biasa menjadi persoalan utama yang serupa. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan adanya pelatihan berkelanjutan sebagai kunci keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusi. Situasi ini diperparah dengan fakta bahwa GPK lebih sering berada di ruang sumber daripada mendampingi langsung di kelas reguler, sehingga guru kelas harus menangani PDBK tanpa dukungan yang memadai, yang pada akhirnya mengurangi kualitas pembelajaran yang diterima oleh PDBK.

Beban ganda yang dialami guru kelas merupakan konsekuensi langsung dari keterbatasan sistem dukungan dalam pendidikan inklusi. Guru kelas merasa terbebani karena harus membagi perhatian untuk siswa reguler dan PDBK tanpa adanya pembagian tugas yang jelas dengan GPK. Mereka harus mengelola pembelajaran dengan diferensiasi, menyesuaikan materi, dan memberikan perhatian khusus kepada PDBK sambil tetap memastikan siswa reguler mendapatkan pembelajaran yang berkualitas. Tantangan ini semakin berat mengingat jumlah siswa dalam satu kelas mencapai 30-an anak dengan latar belakang dan

kebutuhan yang beragam. Ketiadaan kebijakan khusus yang meringankan beban guru kelas menunjukkan perlunya intervensi struktural dari pihak sekolah dan pemerintah. Tanpa sistem pendampingan yang memadai dan pembagian peran yang jelas antara guru kelas dan GPK, pembelajaran untuk PDBK menjadi tidak maksimal, sementara guru kelas mengalami kelelahan fisik dan mental yang dapat berdampak pada kualitas pengajaran secara keseluruhan.

Terbatasnya sarana dan prasarana serta belum tersedianya anggaran khusus untuk pendidikan inklusi menjadi tantangan besar yang menghambat optimalisasi layanan. Kepala sekolah, guru, dan GPK sepakat bahwa fasilitas seperti alat bantu belajar, aksesibilitas fisik, dan media pendukung masih sangat minim. Ketiadaan fasilitas dasar seperti toilet khusus, jalur akses kursi roda, alat bantu dengar, dan media visual menunjukkan bahwa sekolah belum sepenuhnya siap secara infrastruktur untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi yang berkualitas. Dari sisi pembiayaan, ketiadaan alokasi dana khusus untuk inklusi membuat sekolah harus berinovasi sendiri dalam mengelola anggaran BOS yang ada, bahkan terkadang menggunakan dana pribadi. Keterbatasan ini menunjukkan adanya kebutuhan akan kebijakan yang lebih berpihak dan dukungan anggaran dari pemerintah daerah untuk menjamin keberlangsungan layanan pendidikan inklusi secara optimal. Tanpa dukungan finansial yang memadai, upaya sekolah dalam menyediakan

lingkungan belajar yang inklusif akan terus terhambat, dan beban finansial akan terus berpindah kepada guru dan orang tua PDBK.

Kolaborasi antara guru kelas, GPK, dan orang tua merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pendidikan inklusi, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala. Meskipun kolaborasi sudah mulai terjalin, intensitas dan sistematisasinya masih terbatas karena belum ada jadwal khusus untuk evaluasi bersama atau perencanaan pembelajaran yang terkoordinasi. Komunikasi antara guru kelas dan GPK sering terjadi secara spontan tanpa dokumentasi dan tindak lanjut yang jelas, sehingga konsistensi dalam penanganan PDBK sulit tercapai. Sementara itu, hubungan antara sekolah dan orang tua siswa PDBK juga belum optimal, di mana komunikasi masih jarang terjadi dan belum ada program khusus untuk melibatkan orang tua secara aktif dalam proses pendidikan anak. Kondisi ini menunjukkan pentingnya membangun sistem komunikasi yang lebih terstruktur, menyediakan waktu khusus untuk koordinasi antarpihak, dan memberikan pelatihan kepada orang tua tentang cara mendukung pembelajaran anak di rumah. Tanpa kolaborasi yang solid dan terstruktur, upaya menciptakan pembelajaran inklusi yang efektif akan menghadapi hambatan yang signifikan.

Di tengah berbagai tantangan, pendidikan inklusi di SD Negeri 016 Sungai Kunjang menunjukkan peluang signifikan dalam membentuk karakter siswa yang toleran dan

empatik. Penelitian Hasugian & Sidabalok (2024) menunjukkan bahwa pendidikan inklusi tidak hanya berdampak pada aspek akademik, tetapi juga berkontribusi besar dalam pembentukan karakter siswa, terutama sikap empati dan penerimaan terhadap keberagaman. Temuan di SD Negeri 016 Sungai Kunjang menunjukkan bahwa siswa reguler secara umum telah mampu menunjukkan sikap toleransi dan dukungan kepada teman-teman PDBK, walaupun beberapa kasus diskriminasi atau kurangnya pemahaman masih terjadi. Banyak siswa reguler yang bersedia membantu teman PDBK dalam kegiatan pembelajaran, yang menunjukkan bahwa nilai-nilai inklusi mulai terinternalisasi dalam perilaku mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusi memiliki peluang besar untuk menciptakan lingkungan belajar yang toleran dan kolaboratif. Dengan pembinaan yang berkelanjutan dan pemodelan perilaku inklusif oleh guru, sikap positif ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk menciptakan generasi yang lebih menghargai keberagaman dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

Secara keseluruhan, temuan dalam penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa pendidikan inklusi di sekolah dasar menghadapi tantangan yang kompleks dan multidimensional, mulai dari kurangnya tenaga pendidik khusus, keterbatasan pemahaman guru kelas mengenai pembelajaran bagi ABK, hingga kurikulum yang belum sepenuhnya adaptif terhadap

kebutuhan individu siswa. Minimnya dukungan orang tua dan masyarakat serta kurangnya sarana dan prasarana menjadi faktor yang menghambat terselenggaranya pendidikan inklusi secara optimal. Namun di sisi lain, peluang dalam meningkatkan kualitas pembelajaran tetap terbuka lebar, baik melalui pelatihan guru, penyediaan GPK yang memadai, maupun penerapan strategi pembelajaran kreatif yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individual siswa. Untuk itu, optimalisasi pendidikan inklusi di SD Negeri 016 Sungai Kunjang perlu dilakukan secara komprehensif melalui penguatan sistem pendukung, peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan, penyediaan anggaran khusus dari pemerintah, serta kolaborasi yang terstruktur dan berkelanjutan antara sekolah, orang tua, dan pemerintah. Hanya dengan pendekatan holistik dan dukungan dari semua pihak, pendidikan inklusi dapat memberikan manfaat maksimal bagi semua peserta didik dan menciptakan lingkungan belajar yang benar-benar inklusif dan berkualitas.

D. Kesimpulan

Penelitian ini mengidentifikasi sembilan temuan penting dalam implementasi pendidikan inklusi di SD Negeri 016 Sungai Kunjang. Pemahaman tentang pendidikan inklusi belum merata di antara pemangku kepentingan, dengan kepala sekolah dan GPK memiliki pemahaman yang lebih mendalam dibandingkan guru kelas dan orang tua. Tantangan utama meliputi

keterbatasan jumlah GPK dengan rasio 2 GPK untuk 54 PDBK, beban ganda guru kelas dalam mengelola pembelajaran diferensiasi, minimnya sarana dan prasarana pendukung, serta ketiadaan anggaran khusus untuk pendidikan inklusi. Kurikulum sudah mulai disesuaikan namun masih terbatas dan belum sistematis. Di sisi positif, kolaborasi antara guru kelas, GPK, dan orang tua sudah mulai terbentuk meskipun belum optimal, dan sikap siswa reguler terhadap PDBK menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusi dapat dijalankan lebih optimal melalui penguatan sistem pendukung, peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan, penyediaan anggaran khusus, serta kolaborasi terstruktur antara sekolah, orang tua, dan pemerintah. Optimalisasi pendidikan inklusi memerlukan pendekatan holistik dan dukungan komprehensif dari semua pihak untuk menciptakan lingkungan belajar yang benar-benar inklusif dan berkualitas bagi semua peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggreani, K., Tafsira, N. A., Febriyani, T., & Syafitri, E. (2024). Implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar: Tantangan dan strategi efektif. *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Matematika*, 1(2), 199–204. <https://doi.org/10.62383/katalis.v1i2.355>
- Arifin, F., Supena, A., & Yufiarti, Y. (2023). Praktik pendidikan

- inklusif di sekolah dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(1), 198–208.
<https://doi.org/10.31949/educatio.v9i1.4191>
- Arriani, F., Agustiawati, Rizki, A., Ranti, W., Wibowo, S., Tulalessy, C., & Herawati, F. (2021). Panduan pelaksanaan pendidikan inklusif. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 26–30.
- Halidjah, S., & Asrori, H. M. (2025). Tantangan dan peluang dalam implementasi pendidikan inklusif di SDN 24 Kecamatan Pontianak Kota. *Jurnal Kajian Pembelajaran dan Keilmuan*, 9(1), 8–15.
<https://doi.org/10.26418/jurnalkpk.v9i1.88750>
- Hanaa, H., & Mia Evani, E. (2022). Peran penting guru pembimbing khusus dalam pendidikan inklusi di SDI Al-Muttaqin. *Jurnal Review Pendidikan Dasar: Jurnal Kajian Pendidikan dan Hasil Penelitian*, 8(3), 167–171.
<https://doi.org/10.26740/jrpd.v8n3.p167-171>
- Hasugian, T., & Sidabalok, P. P. (2024). Peran pendidikan inklusif dalam membentuk sikap empati dan penerimaan terhadap perbedaan di kalangan anak-anak, 1(2).
- Mustika, M., Irsanti, A. Y., Setiyawati, E., Yunita, F., Fitri, N., & Zulkarnaini, P. (2023). Pendidikan inklusi: Mengubah masa depan bagi semua anak. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(4), 41–50.
<https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v1i4.1575>
- Ni'mah, N. U., Isti Rohmah, A. N., Hamidaturrohmah, & Widiyono, A. (2022). Problematika penyelenggara pendidikan inklusi di sekolah dasar. *Jote*, 3(3), 345–353.
- Sembung, M. P., Rotty, V. N. J., & Lumapow, H. R. (2023). Implementasi kebijakan pendidikan inklusi di sekolah dasar. *Cakrawala Repository IMWI*, 6(4), 613–621.
<https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i4.384>
- Sugiyono. (2020). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Tahsinia, J., & Pujiaty, E. (2024). Strategi pengelolaan pendidikan inklusif untuk meningkatkan aksesibilitas di sekolah dasar, 5(2), 241–252.
- Wijaya, S., Supena, A., & Yufiarti. (2023). Implementasi program pendidikan inklusi pada sekolah dasar di Kota Serang. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(1), 347–357.
<https://doi.org/10.31949/educatio.v9i1.4592>